



WALIKOTA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 617 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH
PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011**



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 617 / KEP / 2007

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011; serta untuk menjamin keberhasilan program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD tersebut, maka disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011;
- b. bahwa Kota Yogyakarta memiliki potensi perekonomian yang memungkinkan untuk terus dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011
- PERTAMA : RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah dokumen perencanaan program terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah serta meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 dimaksudkan sebagai pedoman dan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam membuat komitmen pada program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.

- KETIGA : Penjabaran RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 akan ditindaklanjuti setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD).
- KEEMPAT : Menunjuk Asisten Tata Praja dibantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Aksi Daerah Ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Tembusan :

- Yth : 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Yogyakarta.
3. Asisten Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.
4. Asisten Administrasi Setda Kota Yogyakarta.
5. Kepala SKPD se-Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 617 /KEP/2007
TANGGAL : 8 Desember 2007

**RENCANA AKSI DAERAH
PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN PENDAPATAN DAERAH**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Lingkup	3
Bab II KONDISI PEREKONOMIAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4
A. Kondisi Perekonomian Kota Yogyakarta	4
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	4
2. Struktur Perkonomian Daerah	7
3. Inflasi	10
B. Kondisi Pendapatan Daerah	11
1. Pendapatan Asli Daerah.....	12
2. Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah	13
C. Permasalahan dan Tantangan	15
1. Permasalahan	15
2. Tantangan	15
Bab III LANDASAN PELAKSANAAN	17
A.. Landasan Teorii	17
1. Pertumbuhan Ekonomi	17
2. Pendapatan Daerah	20
B. Landasan Hukum	20

Bab IV	RENCANA AKSI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH	22
	A. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	22
	1. Prioritas	23
	2. Upaya dan Rencana Aksi	24
	B. Peningkatan Pendapatan Daerah	24
	1. Prioritas	24
	2. Upaya dan Rencana Aksi	26
Bab V	PELAKSANAAN	26
	A. Mekanisme	26
	1. Koordinasi	26
	2. Pelaksanaan	26
	3. Keterkaitan dengan RAD lainnya	27
	B. Kelembagaan	27
	C. Pendanaan	27
	D. Indikator	27
	1. Pertumbuhan Ekonomi	27
	2. Peningkatan Pendapatan Daerah	38
	3. Keterkaitan dengan Program pada RAD lainnya.	41
Bab VI	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2000 membawa implikasi yang luas bagi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah menuntut daerah untuk semakin mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kemandirian diberikan dalam bentuk penyerahan urusan kewenangan yang harus dijalankan diluar kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah kewenangan di luar politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah apabila daerah akan mengambil keputusan maka perlu mendapatkan petunjuk dan kebijakan dari Pemerintah, maka setelah otonomi daerah memungkinkan untuk mengambil keputusan yang berada dalam bagian kewenangannya tanpa harus berkonsultasi dengan Pemerintah.

Kemandirian lainnya bagi daerah adalah pemberian sumber pendapatan yang lebih pasti kepada daerah. Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah adalah : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Selain sumber yang lebih jelas, daerah dapat pula mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari PAD yang tidak membebani masyarakat secara berlebih, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada beberapa tahun terakhir perekonomian di Indonesia belum menunjukkan pemulihan yang berarti setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998, yang juga berimbas ke daerah. Kondisi tersebut di daerah Kota Yogyakarta diperberat dengan terjadinya bencana gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006. Beberapa indikator ekonomi yang mendukung kondisi tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, tingkat pengangguran yang masih tinggi dan investasi yang belum maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas menuntut pula kemampuan daerah untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan pada pendekatan tersebut maka pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011, dalam kaidah pelaksanaan disebutkan bahwa RAD ini merupakan kumpulan program dan kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan, agar program yang telah disusun dalam RPJMD lebih berhasil.

B. Maksud dan Tujuan

RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Tahun 2007-2011 disusun sebagai landasan dan strategi yang kuat serta pedoman dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kegiatan dan program prioritas untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RAD ini adalah:

1. mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi
2. meningkatkan kepastian dan kenyamanan berusaha
3. menumbuhkan iklim investasi yang sehat dan kondusif
4. meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang lebih cepat dari sisi waktu, lebih mudah dari sisi aksesibilitas, lebih pasti dari sisi aturan main, adil dan dengan biaya yang terjangkau;
5. meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kegiatan perekonomian;
6. menegakkan peraturan yang tegas dan adil berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku;

7. meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;
8. meningkatkan fasilitasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

C. Lingkup

RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta merupakan dokumen daerah yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya untuk kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2007-2011. Dokumen ini mengakomodasikan kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan terkait dan disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi.

BAB II

KONDISI PEREKONOMIAN DAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kondisi Perekonomian Kota Yogyakarta

Kinerja perekonomian daerah dapat diketahui dari beberapa indikator, antara lain pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian dan laju inflasi. Beberapa indikator tersebut tidak seluruhnya dapat dikontrol oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi faktor pendukungnya relatif dapat dikontrol, antara lain adanya kepastian hukum, mekanisme perijinan dan kondisi ketertiban serta keamanan.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dari dua sisi, yaitu sisi produksi dan sisi pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran terjadi jika ada kenaikan/peningkatan nilai tambah pada 9 (sembilan) sektor usaha dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kesembilan sektor tersebut adalah (1) pertanian, (2) pertambangan/penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa. Dari sisi permintaan pertumbuhan ekonomi terjadi jika ada kenaikan/peningkatan konsumsi masyarakat, investasi perusahaan, konsumsi pemerintah dan nilai bersih pertukaran/perdagangan antara daerah/internasional. Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan akan lebih optimal, jika peningkatan konsumsi tersebut digunakan untuk menambah investasi.

Berdasarkan data, maka dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta terutama disebabkan oleh peningkatan sektor usaha yang berkaitan dengan jasa yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa; dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Jika lebih dicermati, maka keempat sektor tersebut ditarik/dipengaruhi oleh dua lokomotif yaitu pariwisata dan pendidikan. Dari sisi konsumsi pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta didorong oleh meningkatnya konsumsi

masyarakat. Besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2003 - 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel1
Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar harga Konstan Tahun 2000
Di Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006

No	Sektor Kegiatan	2003	2004	2005	2006
1.	Pertanian	-5.64	-13.96	-11.79	-4,66
2.	Pertambangan/Penggalian	-24.13	-9.95	-34.77	-8,68
3.	Industri Pengolahan	4.49	1.56	2.38	0,25
4.	Listrik, Gas dan Air bersih	6.94	4.56	5.30	-1,85
5.	Bangunan	7.88	11.20	7.14	13,28
6.	Perdagangan	6.08	4.93	6.24	5,11
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	8.14	13.93	5.20	5,20
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2.90	2.71	7.50	-1,84
9.	Jasa-jasa	1.67	0.90	2.46	5,80
	PERTUMBUHAN EKONOMI	4.76	5.05	4.88	4,13

Sumber : B P S/YDA Kota Yogyakarta

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta sebesar 4,76%, tahun 2004 meningkat menjadi 5,05%. Pada tahun 2005 turun menjadi 4,88% dan turun kembali pada tahun 2006 menjadi 4,13%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 didorong oleh meningkatnya sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,14%, sektor bangunan meningkat sebesar 7,88%, sektor listrik, gas dan air bersih meningkat sebesar 6,94% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang meningkat sebesar 6,08%. Tetapi di sisi lain ada penurunan, yaitu sektor pertambangan dan penggalian yang menurun sebesar 24,13% dan sektor pertanian yang menurun sebesar 5,64%. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh meningkatnya aktifitas perekonomian sehubungan dengan semakin membaiknya iklim investasi dan berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong sektor riil. Pertumbuhan

ekonomi terutama didorong oleh meningkatnya sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,93%, sektor bangunan yang meningkat sebesar 11,20% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang meningkat sebesar 4,93%. Tetapi dua sektor yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2003, di tahun 2004 kembali menurun. Sektor pertanian menurun sebesar 11,96% dan sektor pertambangan dan penggalian menurun sebesar 9,95%.

Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2004 disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM sebanyak dua kali. Sebagai akibat kenaikan harga BBM, maka akan meningkatkan biaya produksi dengan meningkatnya biaya produksi, salah satu upaya yang dilakukan oleh sektor usaha adalah menurunkan volume usahanya. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya berbagai sektor yang relatif merata. Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan meningkat sebesar 7,50%, sektor bangunan meningkat sebesar 7,14%, sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat 6,25% dan sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat sebesar 5,20%. Seperti dua tahun sebelumnya, dua sektor yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian kembali mengalami pertumbuhan negatif. Sektor pertambangan dan penggalian menurun sebesar 34,77% dan sektor pertanian menurun sebesar 11,79%.

Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi berkurang kembali menjadi 4,13%, berkurangnya angka pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh terjadinya bencana gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006. Akibat bencana gempa bumi empat sektor usaha mengalami pertumbuhan yang negatif. Sektor pertambangan dan penggalian menurun sebesar 8,68%, sektor pertanian menurun sebesar 4,66%, sektor listrik, gas dan air bersih menurun sebesar 1,85% dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan menurun sebesar 1,84%. Seiring dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2006 didorong oleh meningkatnya sektor bangunan sebesar 13,28%, sektor jasa-jasa sebesar 5,80%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,20% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat sebesar 5,11%.

Dari sisi permintaan berdasarkan Laporan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta 2006 yang disusun oleh Bank Indonesia Yogyakarta, pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta selama tiga tahun terakhir disumbang

oleh konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (investasi), konsumsi rumah tangga dan nilai perdagangan antar daerah/ internasional. Pelambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 disebabkan oleh bencana gempa bumi. Salah satu akibat dari gempa bumi adalah rusaknya alat produksi, yang mendorong pelaku usaha mendatangkan bahan baku atau barang setengah jadi dari luar Propinsi DIY yang kemudian mereka melakukan *finishing*. Gempa bumi juga mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Berkurangnya jumlah wisatawan akan menurunkan tingkat konsumsi masyarakat dan perdagangan antar daerah/internasional.

2. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah mencerminkan sektor-sektor yang dominan/unggulan/strategis dalam perkembangan perekonomian daerah. Sektor unggulan tersebut dapat diketahui dari sumbangan sembilan sektor usaha dalam PDRB terhadap keseluruhan nilai PDRB, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Struktur Perekonomian Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006

Lapangan Usaha	Tahun			
	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	0,7	0,6	0,5	0,5
2. Pertambangan dan Penggalan	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Industri Pengolahan	12,5	12,1	11,8	11,3
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,4	1,4	1,4	1,3
5. Bangunan	6,5	6,9	7,0	7,6
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	25,2	25,2	25,5	25,8
7. Pengangkutan dan Komunikasi	16,7	18,2	18,2	18,4
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	14,3	14,0	14,3	13,5
9. Jasa-jasa	22,7	21,8	21,3	21,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0

Berdasarkan data tersebut di atas, maka struktur perekonomian Kota Yogyakarta adalah sektor lapangan usaha yang berkaitan dengan jasa. Sektor

unggulan pertama adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran, selama empat tahun sumbangannya pada PDRB sebesar 25%. Sektor unggulan selanjutnya adalah Jasa-jasa, yang memberikan sumbangan pada PDRB sebesar 21% selama kurun waktu empat tahun. Sektor selanjutnya adalah Pengangkutan dan Komunikasi yang memberikan sumbangan pada PDRB selama empat tahun terakhir sebesar 18%. Sektor terakhir adalah Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan yang memberikan sumbangan pada PDRB selama empat tahun terakhir sebesar 14%. Sektor industri yaitu Industri Pengolahan berada pada peringkat kelima sebagai sektor unggulan, memberikan sumbangan pada PDRB selama empat tahun terakhir sebesar 11%-12%.

Keempat sektor yang berkaitan dengan jasa tersebut apabila lebih dicermati ditarik oleh dua lokomotif utama dalam perkembangannya. Kedua lokomotif tersebut adalah pariwisata dan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan beberapa perguruan tinggi pada tahun 2004/2005 membuktikan, bahwa sumbangan pendidikan pada perekonomian di DIY, khususnya Kota Yogyakarta angkanya cukup signifikan. Kemudian pada sektor industri pengolahan, apabila dicermati lebih mendalam maka sebagian besar pelakunya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kota Yogyakarta memiliki beberapa predikat, antara lain sebagai Kota Perjuangan, Kota Pelajar, Kota Budaya, dan Kota Wisata. Sebagai kota budaya dan pariwisata, Yogyakarta adalah kota yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sampai saat ini masih tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Keunggulan tersebut menjadikan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata yang terkemuka. Kepariwisataannya di Kota Yogyakarta merupakan salah satu lokomotif perekonomian daerah, sehingga potensi dan peluang pariwisata senantiasa terus dikembangkan dan ditingkatkan keberadaannya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun sektor pariwisata mengalami fluktuasi kunjungan wisatawan dikarenakan faktor eksternal. Pada tahun 2004 wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta sebanyak 1.800.000 orang sementara pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi sebesar 1.600.000 orang (Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta, 2006). Dari jumlah tersebut 9,8% diantaranya adalah wisatawan mancanegara. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok wisatawan yang paling banyak berkunjung ke Kota Yogyakarta adalah

kelompok wisatawan nusantara. Dengan demikian beberapa hal yang harus dipertimbangkan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengembangkan kepariwisataan adalah meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mempertahankan serta memantapkan kunjungan wisatawan nusantara. Dalam mempertahankan dan memantapkan kunjungan wisatawan nusantara ini, hal yang perlu diperhatikan antara lain profil/karakteristik, motivasi, tujuan perjalanan, pola pergerakan dan perilaku wisatawan nusantara.

**JUMLAH WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE OBYEK WISATA
KOTA YOGYAKARTA**

TAHUN	WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGERA	JUMLAH
2001	1,560,868	180,760	1,741,628
2002	1,167,877	91,799	1,259,676
2003	1,306,253	64,624	1,370,877
2004	1,696,835	103,400	1,800,235
2005	1,442,045	157,955	1,600,000
2006	654,502	60,708	715,210

Sumber: Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta

Berkembangnya kepariwisataan di Kota Yogyakarta akan berperan besar dalam menentukan PAD yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta karena 31% dari PAD Kota Yogyakarta merupakan PAD yang diperoleh dari sektor pariwisata. Dengan demikian efek bola salju pengganda (*multiplier effect*) pariwisata terhadap perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta sangat besar. Tingginya PAD sektor pariwisata juga dipengaruhi oleh lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta yang pada tahun 2005 mencapai 2,3 hari (untuk lama tinggal rata-rata).

Predikat Kota Pendidikan secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan perekonomian Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan jasa yang mendukung pendidikan merupakan salah satu sektor andalan yang memberikan kontribusi cukup besar bagi PDRB Kota Yogyakarta, dengan demikian predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas harus terus dipertahankan. Sebagai langkah konkret perlu diciptakan program terpadu dengan mengakumulasi masyarakat terdidik dan kehidupan yang akademis. Untuk membangun masyarakat terdidik diharapkan pendidikan formal maupun nonformal mendasarkan pengembangan IQ, EQ dan SQ melalui pendidikan dan latihan yang terencana serta membangun iklim akademis (*academic atmosphere*). Dalam

membangun iklim akademik, ditempuh melalui jalur pendidikan formal, budaya buku dan komunitas baca. Seperti diketahui dengan membaca diharapkan terwujud masyarakat kritis dan mampu menerima informasi secara jelas. Di samping itu melalui budaya buku, akan meningkatkan capaian kompetensi belajar.

3. Inflasi

Arti atau definisi umum dari inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum. Menurut penyebabnya, inflasi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu; pertama, *demand pull inflation* (tarikan permintaan) yang berarti laju pertumbuhan uang beredar (misalnya karena kesejahteraan masyarakat meningkat, anggaran pemerintah meningkat secara signifikan, atau kebijakan moneter untuk menambah jumlah uang beredar) lebih besar daripada laju pertumbuhan barang dan jasa yang tersedia di pasar. Inflasi dalam artian ini adalah gejala kenaikan *effective demand* yang terlalu besar, entah oleh karena akibat kebijakan fiskal (anggaran belanja pemerintah) atau oleh kebijakan moneter dari bank sentral. Kedua, *cost push inflation* yang berarti kenaikan biaya-biaya produksi (misalnya upah, suku bunga pinjaman, BBM, listrik, bahan baku, transportasi, dll.) yang akhirnya menyebabkan harga jual barang dan jasa naik. Pentingnya inflasi sebagai salah satu indikator kondisi perekonomian daerah adalah karena inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, artinya jika penghasilan masyarakat tetap tetapi laju inflasi relatif tinggi maka nilai uang menjadi berkurang. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga diikuti tingkat inflasi yang tinggi, maka pertumbuhan tersebut tidak optimal dinikmati masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan.

Perkembangan laju inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2003-2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006

Tahun	Tingkat Inflasi
2003	5,06%
2004	6,95%
2005	14,98%
2006	10,41%

Di Kota Yogyakarta pada umumnya inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan kebutuhan konsumsi masyarakat, misalnya kebutuhan pangan, sadang dan kesehatan. Peningkatan kebutuhan tersebut juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan siklus yang selalu berulang. Misalnya pada saat perayaan hari besar agama, maka ada kecenderungan inflasi meningkat karena peningkatan kebutuhan bahan pangan. Pada saat tahun liburan sekolah dan ajaran baru, maka ada kecenderungan inflasi meningkat karena peningkatan kebutuhan rekreasi dan pendidikan. Pada tahun 2005 terjadi peningkatan inflasi yang cukup besar disebabkan oleh kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak dua kali. Kenaikan harga BBM mendorong kenaikan biaya produksi dan sekaligus harga-harga kebutuhan masyarakat. Inflasi pada tahun 2006 juga masih relatif tinggi, karena efek beruntun dari kenaikan harga minyak, namun dibanding tahun 2005 sudah menurun.

B. Kondisi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Gambaran lebih lengkap dari Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2003-2006

No.	Pendapatan Daerah	Tahun							
		2003	%	2004	%	2005	%	2006	%
1.	PAD	68.621	20,3	78.911	21,5	89.196	22,8	96.552	18,6
2.	Dana Perimbangan	253.513	74,9	268.968	73,2	289.258	73,8	397.151	76,5
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.496	4,9	19.771	5,4	13.433	3,4	25.452	4,9
	Jumlah	338.630	100	367.650	100	391.887	100	519.155	100

Berdasarkan data tersebut di atas, maka sebagian besar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan baik yang berasal dari Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi. PAD memberikan sumbangan pada pendapatan daerah rata-rata 20%, sedangkan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah sebesar 80%.

1. Pendapatan Asli Daerah

PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir. Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari 7 jenis, Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari 6 jenis dan Retribusi Perijinan Tertentu yang terdiri dari 3 jenis. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Perusahaan Daerah (PD) Air Minum Tirtamarta, PD BPR Bank Jogja dan Bank Pembangunan Daerah. Lain-lain PAD yang Sah berasal dari 8 jenis item pendapatan antara lain penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito dan pendapatan dari pengembalian. Untuk lebih jelasnya realisasi PAD tahun 2003-2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Realisasi PAD Tahun 2003-2006 (dalam jutaan)

No.	PAD	Tahun							
		2003	%	2004	%	2005	%	2006	%
1.	Pajak Daerah	33.526	48,9	40.582	50,8	46.107	51,7	43.997	45,6
2.	Retribusi Daerah	16.093	23,5	18.995	23,8	22.797	25,6	24.705	25,6
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.082	5,9	5.286	6,6	6.651	7,5	7.722	8,0
4.	Lain-lain PAD yang Sah	14.920	21,7	15.049	18,8	13.641	15,3	20.127	20,8
	Jumlah	68.621	100	79.912	100	89.196	100	96.551	100

Berdasarkan data tersebut, maka sumber pendapatan daerah yang terbesar adalah pajak daerah, kemudian diikuti retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selama empat tahun terakhir pertumbuhan PAD sebesar 12%, sedangkan pajak daerah tumbuh 10%, retribusi daerah tumbuh 15%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh sebesar 24% dan lain-lain PAD yang sah tumbuh 13%. Besar kecilnya PAD ditentukan oleh jumlah jenis pajak dan retribusi, besar kecilnya basis/tarif pajak dan retribusi serta pertumbuhan perekonomian daerah. Upaya untuk meningkatkan PAD pada umumnya dilaksanakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi serta mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian daerah.

PAD yang sebagian besar bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh dengan baik, roda perekonomian berputar dengan baik maka pajak daerah yang dominan berupa pajak hotel dan restoran dan retribusi parkir akan semakin besar dan berpengaruh pada kenaikan PAD.

2. Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi. Dari Pemerintah, dana perimbangan meliputi Bagi Hasil, DAU dan DAK. Dana Bagi Hasil meliputi bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Bagi hasil pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, 25 dan 29. Bagi hasil sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Dana Perimbangan dari Pemerintah Propinsi yang dalam struktur APBD dikategorikan sebagai Lain-lain Pendapatan yang Sah antara lain bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (PPPABT) dan bagi hasil retribusi daerah. Lain-lain Pendapatan yang Sah juga berasal dari Hibah dan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi. Untuk lebih jelasnya realisasi Dana Perimbangan Kota Yogyakarta pada tahun 2003-2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6
Realisasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah
Tahun 2003-2006 (dalam jutaan rupiah)

No.	Pendapatan Daerah	Tahun							
		2003	%	2004	%	2005	%	2006	%
1.	Dana Perimbangan	232.601		241.176		247.277		362.047	
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.301	12,0	37.889	13,1	39.446	13,0	40.415	9,6
b.	DAU	196.100	72,6	197.787	68,3	201.231	66,5	316.832	74,9
c.	DAK	4.200	1,6	5.500	1,9	6.600	2,2	4.800	1,1
2.	Lain-lain Pendapatan	37.408	13,9	48.562	16,8	55.413	18,3	60.826	14,4
	Jumlah	270.009	100	289.738	100	302.690	100	422.873	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas komponen terbesar dana perimbangan berasal dari DAU, kemudian diikuti dengan lain-lain pendapatan yang sah dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Dana Perimbangan selama tiga tahun terakhir meningkat rata-rata sebesar 17%, dana bagi hasil pajak/bukan pajak meningkat rata-rata sebesar 8%, DAU meningkat rata-rata sebesar 20%, DAK meningkat rata-rata sebesar 8% dan lain-lain pendapatan yang sah meningkat rata-rata sebesar 18%. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat dilaksanakan

melalui memperkuat daya tawar kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi DIY serta mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian daerah.

C. Permasalahan dan Tantangan

Beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam mendorong dan menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan

a. Pertumbuhan ekonomi

- 1) masih rendahnya investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta
- 2) masih belum optimalnya kemampuan SDM
- 3) belum optimalnya pelayanan perijinan dalam mendukung iklim usaha yang kondusif
- 4) masih rendahnya akses permodalan bagi UMKMK
- 5) belum optimalnya data yang berkaitan dengan potensi pertumbuhan

b. Pendapatan daerah

- 1) belum tersedianya database potensi pendapatan daerah yang memadai
- 2) belum mantapnya sistem manajemen pemungutan pajak dan retribusi
- 3) belum semua aset daerah dimanfaatkan secara optimal
- 4) tingkat kesadaran wajib pajak dan retribusi masih relatif rendah

2. Tantangan

a. Pertumbuhan ekonomi

- 1) Persaingan antar daerah dalam menarik para investor
- 2) Persaingan dalam pengembangan sektor kepariwisataan dan pendidikan antar daerah
- 3) besarnya dana perbankan yang belum dimanfaatkan oleh dunia usaha/masyarakat di Kota Yogyakarta

- 4) Pemanfaatan kemajuan Teknologi informasi dalam memasarkan kota dan produk-produk kota serta dalam pelayanan perijinan

b. Pendapatan daerah

- 1) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi
- 2) Peluang kerjasama kemitraan dengan swasta maupun lembaga-lembaga donor
- 3) Pengembangan sistem pengumpulan dana masyarakat melalui obligasi daerah

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi tersebut diatas perlu dicarikan penyelesaian sehingga upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dapat tercapai. Upaya tersebut merupakan rencana aksi sebagaimana yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.

BAB III

LANDASAN PELAKSANAAN

A. Landasan Teori

Dalam rangka melaksanakan rencana aksi daerah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah perlu dilandasi pada kerangka berpikir secara benar dan berdasarkan prinsip-prinsip teori ekonomi yang dipakai secara umum.

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni pendekatan sisi pengeluaran dan pendekatan sisi produksi. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi dihasilkan oleh investasi swasta, konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, serta ekspor bersih (ekspor minus impor) barang dan jasa. Sedangkan dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor usaha yang ada di daerah tersebut.

a. Investasi

Secara teoritis investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin rendah tingkat investasi karena masyarakat akan lebih tertarik untuk menyimpan uangnya. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunga maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan uangnya melalui kegiatan investasi.

Secara tidak langsung investasi dipengaruhi beberapa hal, antara lain; kondisi makro perekonomian, adanya kepastian hukum, kondisi keamanan, dan insentif yang diberikan. Kondisi makro perekonomian dititikberatkan pada kemampuan dan konsistensi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan/regulasi. Stabilitas ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang terkendali dan terjadinya pemerataan atas pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penarik bagi masyarakat untuk berinvestasi. Kepastian hukum merupakan syarat yang sangat penting untuk menarik investor. Survei-survei yang oleh lembaga independen seperti dilakukan KPPOD, menunjukkan bahwa belum

adanya kepastian hukum merupakan faktor penghambat investasi di Indonesia, kondisi keamanan juga merupakan faktor penting yang dapat menarik investasi.

Beberapa faktor penarik investasi tersebut di atas sebagian berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Beberapa faktor yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki adalah adanya kepastian hukum, kondisi keamanan dan insentif yang diberikan. Kepastian hukum menyangkut kejelasan hak dan kewajiban investor, pemerintah dan masyarakat pada umumnya terhadap adanya kegiatan investasi.

b. Konsumsi

Pengeluaran untuk konsumsi masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini tentu saja tidak terbatas pada penduduk Kota Yogyakarta tetapi juga pendatang yang membelanjakan barang dan jasa di Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan hal ini sebagai kota pendidikan dan pariwisata semakin banyak para pelajar dan mahasiswa datang belajar, semakin banyak kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, pertumbuhan akan semakin besar. Untuk ini diperlukan prasyarat-prasyarat yang harus diperhatikan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan kota pendidikan dan pariwisata.

Kemudian pengeluaran pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan besaran APBD dengan cara mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan. Dalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati karena dapat kontra produktif sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Efek berikutnya dapat menyebabkan kemandegan dunia usaha/sector riil.

c. Ekspor

Perdagangan luar negeri merupakan sektor ekonomi yang sangat berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya dan Kota Yogyakarta pada khususnya. Dari kegiatan ekspor dapat diperoleh

devisa yang merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan. Definisi ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri melalui pelabuhan di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial. Pengertian ekspor ini adalah ekspor bersih, jadi seluruh ekspor dikurangi dengan impor.

d. Pengeluaran Pemerintah

Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal/APBD. Kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah baik belanja barang dan jasa, maupun belanja modal atau investasi dapat membantu menggerakkan sektor riil. Kebijakan fiskal tersebut tercermin di APBD khususnya pada pos pengeluaran, yang memang ditujukan untuk menggerakkan perekonomian daerah selama masih berada dalam batas-batas yang bisa ditopang oleh penerimaan. Kebijakan lain dapat berupa insentif perpajakan; belanja untuk sarana dan prasarana pembangunan, serta meningkatkan daya beli aparatur pemerintah dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan dukungan pemerintah kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur. Peran pengeluaran pemerintah (government expenditure) pada pertumbuhan ekonomi memang tak bisa diabaikan, apalagi saat dunia usaha belum sepenuhnya pulih

e. Sisi Produksi

Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta lebih banyak dipengaruhi oleh sektor tersier. Apabila diurutkan kontribusi yang menentukan perekonomian kota dari yang paling besar ke yang paling kecil adalah lapangan usaha : Perdagangan, hotel dan restoran; Pengangkutan dan komunikasi; Jasa-jasa; Keuangan, sewa dan jasa perusahaan; Industri pengolahan; Listrik , gas dan air; pertanian dan yang paling sedikit adalah pertambangan dan penggalian.

2. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan dari dana perimbangan. Pendapatan yang dapat dikelola oleh daerah mulai dari penetapan, pemungutan sampai dengan penggunaannya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan ini dapat berasal dari pajak dan retribusi, pendapatan dari keuntungan perusahaan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Penerapan otonomi telah membuat pemerintah daerah dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah ini tidak boleh kontra produktif bagi perkembangan investasi dan tidak mendukung gairah pengusaha untuk melakukan ekspansi usahanya atau penanaman modal di daerah.

B. Landasan Hukum

Pelaksanaan pembangunan daerah secara makro lima tahun kedepan Pemerintah Kota Yogyakarta mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Misi yang diemban dalam kedua dokumen perencanaan tersebut yang menyangkut rencana aksi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah adalah "Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa"

Pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan peranan sektor perdagangan, industri dan jasa sehingga dapat terwujud kegiatan-kegiatan yang menggairahkan kehidupan ekonomi kota, memperluas lapangan kerja/ lapangan usaha serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan perhatiannya pada perlindungan usaha menengah, kecil, tradisional dan informal.

Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif sektor jasa sebagai motor penggerak utama didukung oleh keunggulan sektor pendukung terkait dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan publik dalam bentuk kebijakan dan fasilitasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait. Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri serta memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian Selatan.

Pembangunan yang dilaksanakan tersebut di atas ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan per kapita yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu, pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UMKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perkembangan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan usaha mikro, kecil dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Pada saat Indonesia terkena krisis ekonomi pada tahun 1998 yang mengakibatkan perusahaan skala besar yang kolaps, usaha mikro, kecil dan menengah masih mampu bertahan dan menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi angka pengangguran.

BAB IV
RENCANA AKSI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN PENDAPATAN DAERAH

A. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan visi Kota Yogyakarta, maka bidang pendidikan dan pariwisata akan terus dikembangkan sebagai lokomotif ekonomi, dimana dari kedua bidang tersebut akan menggeret gerbong-gerbong perekonomian lainnya.

1. Prioritas

Prioritas peningkatan pertumbuhan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan kapasitas daerah dalam rangka mendorong tumbuhnya iklim usaha yaitu dengan peningkatan pelayanan perizinan, perencanaan pengembangan investasi kedepan, dan menciptakan ketertiban dan ketentraman di Kota Yogyakarta.

Kemudian rencana aksi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mendorong pertumbuhan sektor riil baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi.

a. Sisi pengeluaran, akan dilakukan untuk memperbesar penghasilan, kemudian memperbesar konsumsi dan peningkatan peluang investasi. Konsumsi lebih ditekankan pada konsumsi masyarakat. Prioritas yang akan dilakukan adalah :

- 1) Mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin dan memperpanjang lama tinggal.
- 2) Memperbanyak peluang ekspor dan perdagangan antar daerah.
- 3) Membenahi regulasi tentang perijinan investasi
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi

b. Sisi produksi, akan dilakukan dengan memperkuat sektor sektor ekonomi unggulan seperti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Jasa-jasa; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan; serta Industri Pengolahan. Prioritas yang akan dilakukan adalah :

- 1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Penguatan permodalan
- 3) Peningkatan kualitas produksi
- 4) Peningkatan pasar

Selain itu juga dilakukan penguatan usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan kebijakan prioritas sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses UMKMK pada sumber pembiayaan, yaitu :
 - 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKMK pada sumber pembiayaan
 - 2) Memperkuat sistem penjaminan kredit
 - 3) Mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKMK
- b. Pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia, yaitu :
 - 1) Meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM
 - 2) Mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berbasis teknologi
- c. Peningkatan Peluang Pasar produk UMKMK, yaitu :
 - 1) Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKMK
 - 2) Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan
 - 3) Mengembangkan sinergi pasar
- d. Reformasi Regulasi, yaitu :

Menyusun kebijakan di bidang UMKMK

2. Upaya dan Rencana Aksi

Berkaitan dengan pelaksanaan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sesuai dengan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 adalah meliputi program-program sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan perizinan
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)
3. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
4. Peningkatan Perdagangan

5. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
6. Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan
7. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar
8. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

B. Peningkatan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkatkan. Namun demikian tetap diperlukan adanya upaya-upaya untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah.

1. Prioritas

Prioritas dalam upaya peningkatan pendapatan daerah adalah menyangkut dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tidak menambah beban baru bagi masyarakat. Misalnya dengan melakukan optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penambahan penyertaan modal ke BUMD, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dimiliki, serta optimalisasi Pendapatan lain yang syah.
- b. Mengupayakan pendapatan dari dana perimbangan dan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Meskipun ini merupakan salah satu sumber penerimaan utama daerah, tetapi memang sebagai sebuah instrumen kebijakan fiskal daerah sangat lemah karena banyak sekali faktor yang menentukan besar-kecilnya dana alokasi. Upaya yang dilakukan lebih banyak pada usaha menarik bantuan bukan pada DAU/DAK yang telah memakai rumusan-rumusan tertentu.

2. Upaya dan Rencana Aksi

Berkaitan dengan pelaksanaan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sesuai dengan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 adalah meliputi program-program sebagai berikut :

1. Program peningkatan dan pengembangan pajak daerah dan pajak pusat yang dipungut melalui daerah
2. Program peningkatan kualitas kebijakan pengembangan perekonomian dan pendapatan daerah

BAB V

PELAKSANAAN

A. Mekanisme

Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan daerah dilaksanakan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dengan memperhatikan hal berikut :

1. Koordinasi

Rencana aksi daerah ini mulai dari penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan koordinasi dibawah Asisten Tatapraja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan oleh SKPD dan Unit kerja yang secara terpadu dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan ini lebih banyak menyangkut pengaturan, pembinaan dan fasilitasi terhadap usaha-usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah
- b. Khusus menyangkut sektor riil peningkatan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat dan swasta, sedangkan peran pemerintah hanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi miliknya.

3. Keterkaitan dengan RAD lainnya

Rencana aksi ini tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus didukung oleh rencana aksi lainnya yaitu rencana aksi yang menyangkut pengembangan pariwisata, pengembangan pendidikan, penyediaan sarana-prasarana, peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan, dan pemerintahan yang baik dan bersih.

B. Kelembagaan

Dalam melaksanakan rencana aksi daerah Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong peran SPKD/Unit kerja yang ada secara optimal untuk secara terus

menerus berkomunikasi ataupun kerjasama dengan masyarakat baik pengusaha, asosiasi usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai kesamaan visi, misi dan tujuan.

C. Pendanaan

Rencana aksi daerah peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dilaksanakan dengan menggunakan sumber sumber pendanaan dari :

1. APBN
2. APBD Propinsi DIY
3. APBD Kota Yogyakarta
4. Masyarakat/swasta

.Pendanaan tersebut dialokasikan untuk hal yang menyangkut pengaturan, pembinaan dan fasilitasi yang telah tersusun dalam kegiatan-kegiatan dengan output/keluaran yang meliputi antara lain seperti :

1. Kajian dan penyusunan kebijakan perekonomian dan pendapatan daerah
2. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM/tenaga kerja baik di lingkup pemerintah maupun swasta
3. Pembinaan sektor sektor usaha
4. Fasilitasi promosi, pameran
5. Fasilitasi akses permodalan

D. Indikator

keberhasilan pelaksanaan rencana aksi ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama pada rencana aksi pokok dan pada setiap jenjang program dan kegiatan setiap rencana aksi,

Indikator kinerja utama keberhasilan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi
 - a. Peningkatan PDRB perkapita
 - b. Meningkatnya sumbangan UMKMK terhadap sembilan sektor usaha
 - c. Meningkatnya investasi

2. Peningkatan Pedapatan Daerah

- a. Meningkatnya pendapatan asli daerah
- b. Meningkatnya pendapatan lain-lain

Secara lengkap program dan kegiatan rencana aksi daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu lima tahun dari 2007 – 2011 adalah sebagai berikut :

**MATRIK RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAN
TAHUN 2007 – 2011**

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	TAHUN (dalam jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JML
1.	Memfaatkan teknologi informasi, sumberdaya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur serta kepastian pelayanan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 76% menjadi 82% Ketersediaan regulasi perizinan dari 48% menjadi 56%		934	986	1.037	1.089	1.142	5.118
		Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan		Dinas Perizinan	√	√	√	√	√	
		Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perijinan		Dinas Perizinan	√	√	√	√	√	
		Pengawasan dan Pengaduan Perijinan di Kota		Dinas Perizinan	√	√	√	√	√	
		Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perijinan		Dinas Perizinan	√	√	√	√	√	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	TAHUN (dalam jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JML
2.	Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UMKMK	Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp 106 Milyar menjadi Rp 112 Milyar		2.850	2.467	3.405	3.449	3.954	16.124
		Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia		Dinas Perindagkop	√	√	√	√	√	
		Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Pola Syariah		Dinas Perindagkop	√	√	√	√	√	
		Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Koperasi		Dinas Perindagkop	√	√	√	√	√	
		Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi dan BUKP		Dinas Perindagkop	√	√	√	√	√	
		Pembinaan Koperasi		Dinas Perindagkop	√	√	√	√	√	
		Fasilitasi Pengembangan Industri Kerajinan Melalui Dekranas		Dinas Perindagkop	√	√	√	√	√	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	TAHUN (dalam jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JML
3.	Mengembangkan iklim usaha dan investasi	Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan	Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 63% menjadi 66 %		218	247	271	312	374	1.422
		Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK		Dinas Perindagkop	√	√	√	√	√	
		Program Peningkatan Perdagangan	Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 69% menjadi 73%		2.248	2.479	2.760	3.073	3.423	13.983
		Monitoring dan Evaluasi Perdagangan		Dinas Perindagkop	√	√	√	√	√	
		Pembuatan Ajungan Pemkot di PMPS		Dinas Perindagkop	√	√	√	√	√	
		Pameran dan Promosi Produk Usaha Mikro dan Kecil		Dinas Perindagkop	√	√	√	√	√	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan		Dinas Perindagkop	√	√	√	√	√	
		Pembinaan Pedagang Kaki lima		Dinas Perindagkop	√	√	√	√	√	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	TAHUN (dalam jutaan rupiah)					
					2007	2008	2009	2010	2011	JML
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 57% menjadi 55%		317	344	352	370	387	1.760
		Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√	√	√	√	√	
		Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap K3		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√	√	√	√	√	
4.	Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 109 kelas menjadi 111 kelas terdiri dari : kelas utama yaitu dari 2 kelas menjadi 3 kelas, kelas madya dari 10 kelas menjadi 14 kelas, kelas lanjut dari 27 kelas menjadi 27 kelas, kelas pemula dari 70 kelas menjadi 67 kelas		510	538	567	595	623	2.833

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	TAHUN (dalam jutaan rupiah)					
		Pengembangan 3 UPTD		Kantor Pertanian dan Kehewananan	√	√	√	√	√	
		Pengelolaan Bursa Agro Jogja dan Pasar Ikan Higienis (PIH)		Kantor Pertanian dan Kehewananan	√	√	√	√	√	
		Pengembangan Teknologi Budidaya, Pengolahan dan Perlindungan		Kantor Pertanian dan Kehewananan	√	√	√	√	√	
		Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan		Kantor Pertanian dan Kehewananan	√	√	√	√	√	
		Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Pertanian (DAK)		Kantor Pertanian dan Kehewananan	√	√	√	√	√	
		Pengembangan Budidaya Ikan Hias dan Pemasaran Hasil Perikanan Kota (DAK)		Kantor Pertanian dan Kehewananan	√	√	√	√	√	
		Program Pengembangan Pengelolaan Pasar	Kualitas pengelolaan pasar (ketertiban dari 82% menjadi 84%, keamanan dari 87% menjadi 89%, kebersihan >30' menjadi <30')		3.150	3.325	3.500	5.000	5.000	19.975
		Pembinaan dan Penataan Pedagang		Dinas Pengelolaan Pasar	√	√	√	√	√	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	TAHUN (dalam jutaan rupiah)					
					√	√	√	√	√	√
		Operasional Peningkatan Pendapatan Pasar		Dinas Pengelolaan Pasar	√	√	√	√	√	
		Peningkatan Kebersihan Pasar		Dinas Pengelolaan Pasar	√	√	√	√	√	
		Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar		Dinas Pengelolaan Pasar	√	√	√	√	√	
		Pemeliharaan Pasar Tersebar		Dinas Pengelolaan Pasar	√	√	√	√	√	
5.	Meningkatkan kesadaran kedisiplinan, dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 86% menjadi 87%		3.500	3.675	3.858	4.052	4.147	19.232
		Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi		Dinas Ketertiban	√	√	√	√	√	
6.	Meningkatkan manajemen pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 83% menjadi 86%		1.305	805	810	845	1.075	4.840
		Penyusunan Pra FS Aset Daerah		Bappeda	√	√	√	√	√	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	TAHUN (dalam jutaan rupiah)					
					762	838	922	1.014	1.115	4.651
7.	Meningkatkan efektifitas sistem manajemen perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian & Pendapatan Daerah	Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 74%menjadi 78%							
		Pembinaan Pendapatan Asli Daerah		Bagian Pere - konomian dan Pendapatan Darah	√	√	√	√	√	
		Peningkatan Pemanfaatan Pengelolaan Aset Daerah		Bagian Pere - konomian dan Pendapatan Darah	√	√	√	√	√	
		Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah	Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 10% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 2.5%		5.075	5.362	3.209	3.379	3.560	20.586
		Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan		KPPD	√	√	√	√	√	

NO.	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	TAHUN (dalam jutaan rupiah)				
		Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran		KPPD	√	√	√	√	√
		Optimalisasi Pajak Hiburan		KPPD	√	√	√	√	√
		Optimalisasi Pajak Parkir		KPPD	√	√	√	√	√
		Optimalisasi PBB dan BPHTB		KPPD	√	√	√	√	√
		Pendataan dan Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran		KPPD	√	√	√	√	√
		Pembinaan, Penyuluhan Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak		KPPD	√	√	√	√	√
		Pengadaan Barang		KPPD	√	√	√	√	√

**MATRIK KETERKAITAN RENCANA AKSI DAERAH DENGAN PROGRAM
DALAM RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH**

RENCANA AKSI	PROGRAM
A. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	
1. Peningkatan kapasitas daerah dalam mendorong tumbuhnya iklim usaha	1) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
2. Mendorong pertumbuhan sektor riil baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi, serta penguatan usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi	1) Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UMKMK 2) Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan 3) Program Peningkatan Perdagangan 4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 5) Program Pengembangan Pengelolaan Pasar 6) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
B. Peningkatan Pendapatan Daerah	
1. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tidak menambah beban baru bagi masyarakat	1) Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian & Pendapatan Daerah
2. Mengupayakan pendapatan dari dana perimbangan dan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	2) Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah

3. Keterkaitan dengan Program pada Rencana Aksi Daerah lainnya

Rencana aksi daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah mempunyai keterkaitan dengan rencana aksi daerah lainnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah banyak didorong oleh pengembangan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota tujuan pariwisata. Program-program yang terkait dalam pengembangan tersebut sebagaimana tertuang dalam RAD Pendidikan Berkualitas, dan RAD Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya.

Selain program-program pada kedua RAD diatas juga, diperlukan program yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur perkotaan, penciptaan kondisi kota yang nyaman dan aman bagi pelajar/mahasiswa dan wisatawan, serta iklim berusaha yng kondusif. Program-program yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagaimana yang dituangkan dalam RAD pengembangan sarana dan prasarana berkualitas; RAD peningkatan kualitas lingkungan; RAD mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat; RAD pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih; RAD pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; serta RAD pengurangan resiko bencana.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah akan memberikan dukungan positif dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran, yaitu akan membuka kesempatan kerja baru dan peningkatan pendapatan dapat memberikan dukungan pada pelayanan penanggulangan kemiskinan.

Secara lengkap keterkaitan antara rencana aksi daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah dengan program program yang terkait pada rencana aksi daerah lainnya digambarkan dalam matrik berikut.

**MATRIK KETERKAITAN RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH
DENGAN RENCANA AKSI DAERAH LAINNYA**

RENCANA AKSI	PROGRAM YANG TERKAIT
1. Pendidikan Berkualitas	1) Program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana 2) Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal 3) Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan
2. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya	1) Program Pengembangan Pariwisata 2) Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya 3) Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 4) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan
3. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat	1) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 2) Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan
4. Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih.	1) Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah 2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	1) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan 3) Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan 4) Program Pengembangan Kerjasama Daerah

RENCANA AKSI	PROGRAM YANG TERKAIT
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas	1) Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan	1) Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
8. Pengurangan Resiko Bencana	Program Perbaikan / Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase
9. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 2) Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia dan Difabel serta Pengarusutamaan Gender 4) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah", merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta yang tidak dapat dilaksanakan sendiri tetapi perlu kerjasama berbagai pihak. Oleh karenanya peran serta dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO